

BAB III

PENENTANGAN INDIA TERHADAP

PEMBATASAN DOMESTIC SUPORT ON AGRICULTURE DI

NEGARA SEDANG BEKEMBANG

Pembatasan *domestic support on agriculture* dalam AoA menimbulkan mengharuskan semua negara anggota melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut. Demikian juga dengan semua NSB yang harus mampu untuk mengikuti skema pembatasan *domestic support on agriculture*. India merupakan salah satu negara sedang berkembang (NSB) yang dengan kuat menentang adanya aturan pembatasan *domestic support on agriculture* yang tertuang dalam pilar kesepakatan bidang pertanian atau *agreement on agriculture* (AoA). Seiring dengan bergabungnya India menjadi salah satu anggota WTO sejak awal dibentuknya WTO, India wajib mengikuti keputusan yang disahkan oleh WTO. Dalam bab ini akan membahas mendalam tentang India, latar belakang India menentang adanya aturan *domestic support on agriculture*, serta aksi penentangan India terhadap aturan tersebut sampai pada disetujuinya aksi penentangan India oleh WTO. Kemudian, dalam bab ini akan dianalisa peran India dalam sistem perdagangan internasional.

A. Gambaran Umum Pertanian India

Dalam beberapa NSB maupun negara miskin, pertanian bukan hanya sebagai sebagai sumber *Gross Domestic Product* (GDP) namun juga sebagai

sebuah mata pencaharian utama, ketahanan pangan, juga kehidupan bagi sebagian besar penduduk domestik di negara tersebut. India, sebuah negara dengan penduduk terbesar kedua dengan pertanian sebagai komoditas utama dalam perekonomian.

Berdasarkan Prediksi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimuat dalam *U.N. News Service* menyebutkan bahwa “Penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 8,5 miliar pada 2030, 9,7 miliar pada 2050, dan 11,2 miliar pada 2100, demikian menurut laporan baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan 29 Juli 2015. Penduduk dunia saat ini berkisar 7,3 miliar jiwa dengan Jumlah Populasi India melampaui Tiongkok sebagai negara dengan penduduk terpadat pada 2022” (U.N. News Service, 2015).

Dengan kondisi yang demikian, India harus mampu untuk memberikan jaminan ketahanan pangan bagi setiap penduduknya. Kehidupan India dengan komoditas pertaniannya sudah dimulai dari ribuan tahun yang lalu (Maravi, 2015). Pada awal mulanya, para penduduk India melakukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya yang cukup besar. Dari total tenaga kerja India, sebanyak 49 persen bekerja pada sektor pertanian (Berutu, 2015) . Para penduduk membentuk sebuah pasar hasil pertanian di setiap kota. Seiring dengan perkembangan waktu, hasil panen India yang melebihi kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya kemudian di ekspor keluar negeri. Yang kemudian India menempatkan hasil pertanian sebagai sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi domestiknya. Namun, Para petani India masih banyak yang menerapkan sistem pertanian tradisional dan sekitar 55 persen pertanian India bergantung pada air hujan (Berutu, 2015). Untuk mendukung sektor pertaniannya, pemerintah India

mengeluarkan dukungan domestik yang besar untuk mendukung petani agar mendapatkan hasil pertanian yang tinggi sehingga India mampu menjadi salah satu negara peng-ekspor hasil pertanian yang cukup tinggi.

Beras merupakan komoditas paling utama yang dihasilkan oleh petani India. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan teknologi, India mampu untuk men-supply komoditas pertaniannya sebagai komoditas ekspor. Adapun komoditas pertanian India adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Komoditas Produk Makanan dan Bukan Makanan

Makanan Produk (Biji-bijian, kacang-kacangan, rempah-rempah dan minyak)	Bukan Produk Makanan
Chana / Gram, kacang kedelai / biji, <i>Crude Palm Oil</i> , Ketumbar / Dhaniya, Lada, Jeera (biji jintan), Cabe (<i>Red Chili</i>), Kunyit, Cardamom, Pala, <i>Rape / Mustard Seed</i> , Gandum, Beras, Jagung Pakan, Barley, Bajra, Jowar, kentang, gula, Gur, Coffee Rep Massal, Kopra, minyak kelapa, kacang-kacangan -Tur Dal (Arhar Dal), Tur (Arhar), urad (Mash), urad dal	Mentha Oil, benih Castor, Guar Gum, Kapas, Karet, rami mentah, pemecatan, Bibit Isabgul, Benang, Rami Barang, benang benih bungkil / Kapasia Khali

Sumber: FMC, (www.fmc.gov.in) dalam (Maravi, 2015)

Tabel 3. 2 Komoditas Pertanian India

Kelompok Komoditas Pertanian	Jenis Hasil Pertanian
<i>Oil and Oil seeds</i>	Biji seledri, Minyak Kopra (<i>Coconut Oil</i>), Bungkil Kopra (<i>Coconut bungkil</i>), Kopra /kelapa, Minyak kopra, Minyak biji kapas, Bungkil biji kapas, <i>CPO Refined</i> , <i>Crude Palm Oil</i> , <i>Crude Palm Olive</i> , Kacang tanah, Minyak kacang tanah, Kacang tanah bungkil, Biji rami, Minyak biji rami, Biji rami bungkil, Minyak Mustard, biji Mustard bungkil, Biji Mustard, <i>RBD Palmolein</i> , Beras Bran, <i>Rice Bran Oil</i> , <i>Rice Bran bungkil</i> , Wijen, Minyak wijen, Wijen bungkil, Kedelai, minyak kedelai, Kedelai, Minyak Bunga Matahari, Minyak Biji Bunga matahari, Benih bunga matahari, Minyak Jarak, Benih jarak, biji kapas
Bumbu	Kapulaga, Jeera, Lada, Cabe, Kunyit, Pala, Jahe, Cengkeh, Kayu Manis, Sirih kacang-kacangan, Adas manis
Kacang-kacangan	<i>Chana</i> , <i>Masur</i> , <i>Peas Kuning</i> , <i>Tur Dal (Arhar Dal)</i> , <i>Tur (Arhar)</i> , <i>urad (Mash)</i> , <i>urad dal</i> , <i>Gram Dal</i> , <i>Mung Dal</i>
Sereal (Food Grains)	Jagung, Gandum, Arhar Chuni, Bajra, Barley, Gram, Guar, Jowar, Kulthi, Lakh (Khesari), Moth, Mung, Mung Chuni, Peas, Ragi, beras atau Paddy, Kecil Millets (Kodan Kulti, Kodra, Korra, Vargu, Sawan, Rala, Kakun, Samai, Vari & Banti)
Perkebunan	Kacang Mete, Kopi (Robusta), Karet
<i>Fibers and Manufactures</i>	Benang sutera, Benang Pakaian, Benang polong, Benang Yarn, Benang India, barang Rami (Hessian dan pemecatan dan kain , tas, benang ikat, benang yang diproduksi oleh salah satu pabrik atau produsen lain dalam bentuk apapun yang terbuat dari goni), Kapas, Rami Baku Termasuk Mesta, Benang Serat Staple
Lain-lain	<i>Mentha Oil</i> , Kentang (Agra), Kentang (Tarkeshwar), Gula M-30, Gula S-30

Sumber: FMC, (www.fmc.gov.in) dalam (Maravi, 2015)

Dalam kategorisasi komoditas pertanian India, dikategorikan dalam dua bagian yaitu komoditas yang mudah tumbuh, dan komoditas yang sulit tumbuh

dengan kata lain harus mendapatkan perlakuan yang lebih dibandingkan komoditas yang mudah tumbuh. Contoh dari komoditas yang mudah tumbuh adalah jagung, gandum, beras, dan lain sebagainya, Sedangkan komoditas yang sulit tumbuh adalah komoditas seperti minyak.

Agriculture merupakan sektor yang memenuhi sarana utama kehidupan lebih dari 70 persen dari populasi penduduk India (Maravi, 2015). Dan ini menyumbang lebih dari seperlima dari GDP dan 10 persen dari total pendapatan ekspor. Hal ini merupakan salah satu keunggulan dari India. India menjadi salah satu produsen pertanian terbesar diantara negara anggota WTO lainnya. Namun, fluktuatif pendapatan hasil pertanian di India tidak dapat dipisahkan dari besarnya *domestic support* yang dikeluarkan pemerintah India untuk mengawasi serta mengontrol kestabilan harga komoditas pertanian domestik. Kestabilan harga ini tentunya akan berdampak pada potensi ekspor yang berlangsung.

B. Kepentingan India Menentang Aturan *Domestic Support on*

Agriculture

Skema *Domestic support* dalam *Agreement on Agriculture* oleh WTO mempunyai pengaruh yang signifikan pada setiap negara anggota yang menjadikan *agriculture* sebagai komoditas utama dalam pilar perekonomiannya. Termasuk juga India, skema *domestic support on agriculture* ini mendorong kemandirian sektor pertanian India tanpa ada campur tangan dari pemerintahan negara. Akan tetapi, *domestic support on agriculture* ini dinilai tidak menguntungkan bagi NSB. Adanya dominasi dan juga hegemoni dari negara maju lewat skema ini menimbulkan reaksi

keras dari India untuk melakukan penentangan terhadap aturan tersebut. Dengan jumlah penduduk yang bekerja dalam bidang pertanian, India mengangkat hal ini dalam perundingan yang dilakukan oleh WTO. India merupakan negara dengan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang besar diantara Cina dan Indonesia (Bary, 2013). Cashmore, seorang pengamat ekonomi internasional dalam bukunya juga menjelaskan bahwa Cina dan India merupakan dua negara yang akan memimpin produksi di Asia (Cashmore, 2009). Sehingga, ketika aturan *domestic support on agriculture* ini dirasa merugikan maka India akan melakukan proteksi terhadap sumber daya yang dimilikinya karena hal tersebut berdampak pada turunnya produktivitas pertanian pada perekonomian India. Maka dari itu, dalam penentangan India terhadap pembatasan *domestic support on agriculture* India mempunyai kepentingan, adapun kepentingan India adalah sebagai berikut:

B.1 Ketahanan Pangan

Permasalahan produktivitas pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan di suatu negara. Sebagai NSB, hasil pertanian yang dihasilkan akan berdampak bagi ketahanan pangan domestik. Hal demikian yang terjadi pada India. Dengan jumlah penduduk yang besar, disepakatinya pembatasan *domestic support on agriculture* ini menimbulkan dampak pada masalah ketahanan pangan nasional India. Pasca Revolusi Hijau, India telah mencapai swasembada dalam produksi bahan pangan dan memperkecil jumlah impor komoditas pertanian. India menjadi negara yang mandiri dalam produksi bahan pangan biji-bijian di tingkat makro. Produksi bahan pangan biji-bijian meningkat sekitar 50 juta ton pada tahun 1950-1951 (Sharma, 2010).

Sereal dan kacang-kacangan di India merupakan makanan pokok selain beras. Akan tetapi, bagi sebagian besar penduduk India lebih memilih sereal dan kacang-kacangan dikarenakan memiliki harga yang paling murah dibandingkan bahan pangan pokok lainnya sehingga dapat menjangkau masyarakat dengan penghasilan rendah. Adanya peraturan pembatasan *domestic support on agriculture* berdampak pada hasil panen India. Berdasarkan data *Economic Survey 2013-2014*, terjadinya peningkatan jumlah lahan tidak diikuti dengan peningkatan hasil panen komoditas pertanian bahan pokok, dapat dilihat pada tabel 3.3:

Tabel 3. 3 Penurunan Hasil Panen India

Tahun	Area (juta ha)			Produksi (juta ton)			Panen (kg/ha)		
	Beras	Gandum	Kacang	Beras	Gandum	Kacang	Beras	Gandum	Kacang
2010-11	97,9	105,7	116,4	95,58	86,87	18,24	104,4	110,2	111,1
2011-12	100,5	108,6	107,5	105,3	94,88	17,09	11,5	117,2	112,8
2012-13	97,6	109,1	103,8	104,4	92,46	18,45	114,7	114,9	124,5
2013-14	100,4	111,3	111,1	106,5	95,9	19,3	112,6	115,2	124,6

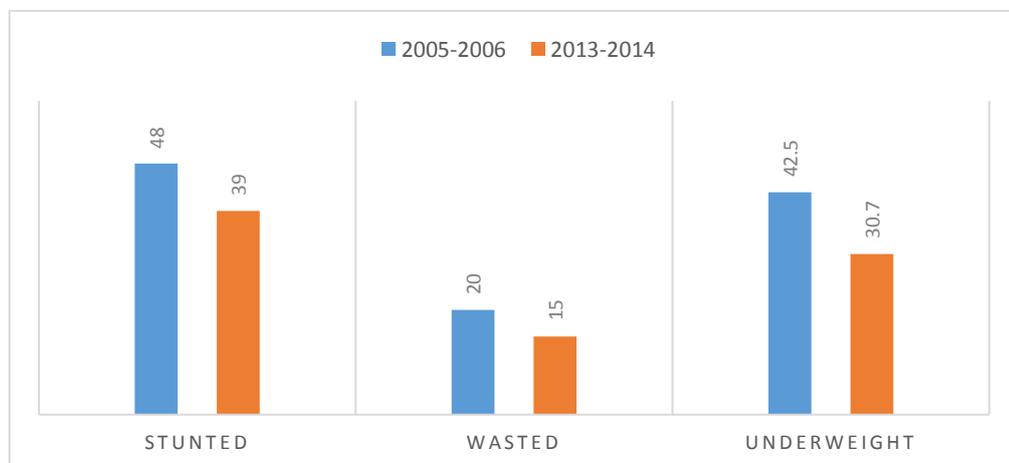
Sumber: *Indian Economic Survey 2013-2014* dalam (Directorat of Economics and Statistics - Department of Agriculture and Cooperation Government of India, 2013)

Peningkatan lahan pada gandum dan kacang tidak diikuti dengan peningkatan hasil panen. Pembatasan *domestic support on agriculture* membawa dampak pada penurunan jumlah hasil panen yang cukup signifikan. Sehubungan dengan hal

tersebut, India merupakan negara dengan kerawanan pangan yang sangat tinggi. Pengurangan jumlah *domestic support* berdasarkan perhitungan WTO ini membuat NSB termasuk India kesulitan dalam memberikan bantuan kepada petani-petani di negaranya, dimana jumlah dukungan yang diberikan agar tidak melebihi *de minimis* yaitu sebesar 10 persen yang telah ditetapkan (Tobing, 2015).

Masalah ketahanan pangan ini kemudian berdampak pada tingkat kelaparan penduduk India. Dalam laporan *Global Hunger Index*, India berada pada peringkat 55 dari 76 negara (Tobing, 2015). Masalah kelaparan merupakan tantangan besar dihadapi oleh India sebagai NSB dalam dua dekade terakhir ini. Kelaparan merupakan isu yang sangat kompleks, akan tetapi adanya pembatasan *domestic support on agriculture* juga memiliki keterkaitan tinggi dengan masalah ini. Terbukti dengan adanya ada masih banyaknya anak usia dibawah lima tahun (balita) yang mengalami kekurangan asupan gizi. Berdasarkan *National Family Health Survey* status asupan gizi balita adalah sebagai berikut:

Grafik 3. 1 Prosentase Jumlah Status Gizi Balita India



Sumber: *National Health Economic Survey* dalam (Tobing, 2015)

India yang diwakili oleh Anand Sharma selaku Menteri Industri dan Perdagangannya menyatakan bahwa isu ketahanan pangan merupakan isu yang tidak dapat dinegosiasikan bagi India karena berhubungan langsung dengan masalah mata pencaharian jutaan petani upah serta ketahanan pangan masyarakat miskin (Government of India, 2013).

B.2 Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan laporan India *Planning commission* rasio kemiskinan di India yang cukup tinggi yakni, 21.9 persen pada tahun 2011-2012 (Planning Commission of India, 2011). Rasio angka penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang menjadikan India sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi kelaparan yang tinggi.

Tabel 3. 4 Rasio Kemiskinan di India

Tahun	Populasi	Populasi Penduduk Miskin (juta)		Prosentase (%)		Prosentase Nasional
		Desa	Kota	Desa	Kota	
2009-10	1.173.108.000	278,2	76,5	33,8	20,9	29,8
2011-12	1.205.074.000	216,5	52,8	25,7	13,7	21,9

Sumber: India Planning Commission (Planning Commission of India, 2011)

Dari data diatas menunjukkan bahwa masyarakat miskin di India masih cukup tinggi. Melihat pada mayoritas penduduk India merupakan petani, sedangkan

dengan adanya pembatasan *domestic support on agriculture* hasil pertanian India menurun hal tersebut akan berdampak pada rasio kemiskinan yang ada di India.

B.3 Mengimbangi Dominasi Negara Maju

Dominasi negara maju melalui skema AoA dapat dilihat dari tidak seimbangya pelakuan yang didapatkan oleh NSB. India sebagai negara berkembang tidak ingin terus untuk mengikuti skema yang dibentuk oleh negara maju agar dapat mendominasi NSB. Dari skema pembatasan *domestic support on agriculture* NSB dilihat adanya kecurangan negara maju dalam mengelompokkan besaran subsidi dalam kategori *boxes*. Adapun hasil dari pengelompokkan *domestic support* pada beberapa negara, perbandingan besaran subsidi yang dikeluarkan antara negara maju dan NSB termasuk India:

Tabel 3. 5 Level Subsidi di Beberapa Negara (Juta \$)

	Year	AMS	Blue Box	Green Box	De Minimis	Export Subsidies
EU	1999/00	47.874 (69.446)	19. 787	19.926	308	5.968
USA	1999	16.862 (19.899)	0	49.749	7.435	147
Japan	1999	6.572 (36.359)	817	23.601	290	-
Brazil	1997/98	74 (893)	0	298	94	-
India	1997/98	0	0	75	98	-
Pakistan	1999/00	0	0	5	0	-

Sumber: See Soren, F., Jensen, K., Lind, P., Melgaard, P. and Yu, W. (2003) *Note on the Harbinson Draft on Modalities in the WTO Agriculture Negotiations*. Agricultural Policy Research Division, Danish Research Institute of Food Economics, 11th March. Fredericksberg, Denmark dalam (ActionAid, 2003)

Dalam tabel diatas bahwa negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengubah sebagian besar *domestic support* nya masuk kedalam kategori *amber box* berpindah kedalam kategori *blue box* dan *green box*. Sejak skema AoA berlaku, negara maju telah “menyulap” jalan *domestic support* mereka kedalam kategori *blue box* dan *green box* untuk menghindari pengurangan komitmen. Perbedaan yang terjadi ketika NSB seperti India, Pakistan dan Brazil yang hanya memiliki besaran subsidi pada *green box* maupun *blue box*. Ketika negara maju mengubah jalan subsidi yang seharusnya masuk ke dalam *amber box* untuk mendapatkan pengurangan AMS maka ini akan *domestic support on agriculture* tidak mengalami pengurangan yang signifikan, sehingga produktivitas pertanian di negara maju tetap bertahan. Hal ini menimbulkan adanya dominasi, ketika NSB mengalami pengurangan *domestic support*-nya. Keseimbangan pasar yang terjadi dengan adanya perubahan kategori *domestic support* oleh negara maju akan menimbulkan ketidakadilan bagi negara berkembang.

Hasil dari mengubah kategori *domestic support on agriculture* ini negara maju mendapatkan keuntungan sebesar 9 persen lebih tinggi dari nominal yang seharusnya mendapatkan pemotongan, dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3. 6 Level Domestic Support on Agriculture (Milyar \$)

	1998	1999	2000	2001	1999-2001 Annual Average
OECD	339	357	321	311	330
USA	91	99	92	95	95
EU	125	130	102	106	113

Sumber:

OECD, (2001) *Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2001. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris*

OECD, (2002) *Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2002. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris dalam (ActionAid, 2003)*

Kuatnya kepentingan India untuk menentang pembatasan *domestic support on agriculture* ini dilatarbelakangi adanya dominasi negara maju di negara berkembang. India tidak ingin bahwa negara maju mendominasi perekonomian yang ada di NSB. Sebagai negara raksasa berkembang, India ingin menguatkan perekonomiannya sehingga dapat bersaing dan diperhitungkan dalam sistem perekonomian global. Sebagai NSB dengan posisi kedua GDP tertinggi di Asia (Bary, 2013) tidak ingin didominasi oleh negara maju. Dalam kaitannya dengan posisi India untuk mendapatkan *bargaining position* yang tinggi dalam perekonomian internasional.

B.4 Resistensi peran WTO

India yang menentang adanya pembatasan *domestic support on agriculture* ini tidak diikuti dengan keluarnya India dari WTO. Sikap India ini memang cukup menarik ketika India ingin memperjuangkan hak-hak petani untuk melawan liberalisasi ekonomi, akan tetapi India tidak ingin untuk keluar dari rezim perdagangan Internasional. Peraturan WTO yang sangat ketat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara anggotanya menimbulkan dampak India untuk melakukan resistensi peran WTO di dunia Internasional. Kebijakan WTO yang seakan menipiskan peran negara ingin dikembalikan oleh India dengan definisi yang lain. Ketika India bukan hanya dengan kelompok G-33 akan tetapi juga kelompok G-20 setuju untuk menginisiasikan adanya perubahan dalam aturan pembatasan *domestic support on agriculture* (Utama, 2010), dapat disimpulkan bahwa India ingin melakukan resistensi peran WTO di dunia Internasional.

C. Penentangan India terhadap Aturan *Domestic Support on Agriculture*

Keseriusan India terhadap masalah pertanian ditunjukkan India dengan melakukan penentangan terhadap aturan *domestic support on agriculture*. Dampak aturan *domestic support on agriculture* pada kesulitan negara untuk memberikan subsidi pada para petaninya sehingga mengakibatkan timbulnya masalah ancaman kehidupan serta kesejahteraan masyarakat di NSB. Sebelum adanya penentangan keras dari pemerintahan India, masyarakat India telah lebih dulu membentuk kelompok untuk menyadarkan pemerintah bahwa pembatasan *domestic support on agriculture* tidak menguntungkan bagi petani di NSB. Kesadaran pemerintah kemudian mulai terbangun dengan adanya kecenderungan dominasi negara maju terhadap NSB.

C.1 Aksi Demo Petani India 1999

Masyarakat India yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menuai dampak dari disahkannya aturan pembatasan *domestic support on agriculture*. Pada pertemuan Tingkat Menteri WTO pada Juni 1999 di Jenewa, forum petani India melakukan aksi protes untuk menuntut adanya tindakan yang adil kepada petani di NSB. Aksi protes ini bukan hanya menentang adanya pembatasan *domestic support on agriculture* yang memberatkan, akan tetapi merupakan akumulasi dari banyaknya kebijakan WTO yang menunjukkan kapitalisme dan mengesahkan tindakah negara maju melakukan dominasi di NSB dalam bidang pertanian.

Aksi protes yang dilakukan oleh petani India pada tahun 1999 ini merupakan hasil keputusan *World Social Forum* yang beranggotakan sejumlah

NSB yang merasa bahwa kebijakan WTO mendiskreditkan kepentingan NSB. Yang sebelumnya, organisasi petani India dan konsumen memulai kampanye “Monsanto: Quit India” (World Social Forum, 2016). Dimana para petani menentang adanya kapitalisasi dari produk pertanian yang ada di India. Dalam *World Social Forum III* diputuskan adanya aksi protes yang diinisiasi oleh forum petani India tanpa ada campur tangan dari pemerintah (World Social Forum, 2016). Karena pemerintah India pada belum sadar akan adanya masalah pertanian yang mengancam keberlangsungan hidup dari masyarakatnya. Aksi protes ini dilakukan oleh ratusan petani India yang langsung ke Jenewa menyampaikan aksinya di depan gedung dalam pertemuan Tingkat Menteri WTO.

C.2 Aksi Demo Forum Petani India (Indian Kisan Sabha) 2001

Aksi protes petani India yang terbang ke Jenewa pada tahun 1999 dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO pada bulan Juni, belum mendapatkan respon yang positif terhadap masalah yang dialami oleh petani di India. Penguasaan komoditas pertanian oleh negara maju dan meninggalkan kepentingan NSB menjadi latar belakang forum petani India dengan para aktivis sosialis India, *Indian Kisan Sabha*, menginisiasi adanya aksi protes petani selanjutnya. Aksi protes kali ini dilakukan di Mumbai, salah satu kota metropolitan terbesar di India. Aksi protes ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2001.

Aksi protes ini merupakan aksi protes yang diwarnai oleh ribuan anggota forum petani India atau *All Indian Kisan Shaba* atau bisa juga di sebut *All India Peasant Union* atau *Akhil Bharatiya Kisan Sabha*. Forum Petani India ini

merupakan sebuah forum gerakan petani yang dibentuk oleh Sahajanand Saraswati pada tahun 1936 (Shodhganga). Para aktivis petani India yang dikenal militan sangat aktif dalam berbagai aksi protes sosial. Tokoh yang berpengaruh dalam aksi protes ini adalah Arundhati Roy, aktivis dari Kerala India.

Dalam aksi protes ini, menurut Roy skema pembatasan *domestic support on agriculture* AoA merupakan sebuah skema pasar bebas yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara akan tetapi juga melecehkan demokrasi. Arundhati Roy menyampaikan bahwa “Kalau Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin tumbuh semakin lebar, perebutan sumber daya akan semakin intensif.” (World Social Forum, 2016). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya pasar bebas yang bukan hanya tidak menguntungkan bagi petani di NSB akan tetapi juga mengembangkan dominasi negara maju di NSB.

Aksi protes sosial menggugat WTO terhadap aturan pembatasan *domestic support on agriculture* ini tidak hanya terjadi di India. Aksi yang sama terjadi dilakukan oleh sejumlah aktivis sosial dan petani NSB lainnya. Hal ini diungkapkan dalam berita online kompasiana bahwa “Protes sosial yang sengaja ditujukan untuk pertemuan-pertemuan internasional menyebar tak terkendali di Washington, Millau, Melbourne, Prague, Nice, Gothenburg, Quebec City, Genoa, Barcelona, Doha, Chiang Mai, Cancun, Porto Alegre adalah kota-kota yang menjadi saksi kelahiran kembali perlawanan terhadap kapitalisme global. Ada kemungkinan, Bali menyusul sebagai kota yang menjadi simbol perlawanan terhadap neo-imperialisme global. LSM yang sering sekali bergerak dalam kritik sosial terhadap kebijakan WTO begitu banyak seperti IGJ, FMN, Serikat Petani Indonesia, dan Koalisi Anti

Utang. Kritik mereka kebanyakan mengarah kepada isu pertanian yang hingga kini belum tuntas dibahas dan disepakati di dalam WTO.” (Zaki, 2015)

C.3 Doha Development Agenda

Aturan *domestic support on agriculture* dengan setiap kerangka aturan dalam AoA adalah mekanisme baru dalam sistem perdagangan WTO yang mengharuskan banyaknya penyesuaian dari NSB. Dengan adanya aksi protes dari aktivis pertanian India, pemerintah India kemudian merasa bahwa permasalahan pertanian telah mengancam kedaulatan negara. Ketika sebagian besar masyarakat India merasakan dampak dari adanya pembatasan *domestic support on agriculture*. Permasalahan yang timbul bukan hanya menjadi permasalahan sekelompok masyarakat tertentu akan tetapi telah menjadi permasalahan mayoritas dari penduduk India. Sehingga, hal tersebut menjadi faktor yang menekan pemerintah India untuk melakukan aksi tegas terhadap permasalahan pembatasan *domestic support on agriculture*.

Untuk menjembatani usulan-usulan dari setiap negara anggota WTO serta mengadakan evaluasi terhadap jalannya kebijakan yang telah ditetapkan, maka dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO diberikan kesempatan bagi setiap negara atau kelompok negara untuk mengajukan usulan proposal masing-masing. Perundingan pertanian dalam kerangka *Doha Round* yang diadakan di Qatar dimaksudkan agar semua negara anggota, baik negara maju maupun NSB, memiliki komitmen yang sama yaitu menuju suatu keadaan sebagai “*fair and market-oriented agricultural trading system*” (Reni Kustiari, 2014). Tujuan akhir dari

proses negosiasi ini adalah mengurangi *trade-distorting domestic support* untuk hasil-hasil dan barang pertanian, memperbaiki akses pasar, dan pengurangan dan atau penghapusan subsidi ekspor. *Doha Round* secara resmi dibuka pada KTM keempat WTO, November 2001. Dalam *Doha Ministerial Declaration* dijelaskan madat *Doha Round* untuk negosiasi berbagai masalah di bidang pertanian, jasa, dan topik kekayaan intelektual (WTO, 2016).

Doha Round ini menjadi kesempatan bagi NSB termasuk India untuk mengajukan proposal penentangan terhadap pembatasan *domestic support on agriculture*. Sejak resmi dibuka, India menginisiasi adanya kelompok NSB dengan tujuan yang sama untuk mengajukan sikap tegas terhadap penentangan pembatasan *domestic support* yang dinilai tidak menguntungkan bagi NSB. Perjalanan panjang AoA dari awal terbentuknya tahun 1995, yang selanjutnya pada tahun 1999 diadakan KTM di Seattle tanpa hasil kesepakatan apapun. Sedangkan pada KTM WTO keempat di Doha Qatar barulah WTO membuka diri untuk mengadakan negosiasi dengan negara anggota dalam bidang pertanian. Sebanyak 121 negara hadir untuk memberikan proposal negosiasinya masing-masing. Dalam KTM WTO kali ini berhasil menyetujui adanya *Doha Development Agenda (DDA)* yang mana setiap negara menyetujui untuk melaksanakan setiap isu yang dinegosiasikan dalam paket Doha ini.

Dalam proposal setelah dibukanya *Doha Round* ini, salah satu point dalam usulan negosiasi India adalah meminta pengurangan bahkan penghapusan pembatasan *domestic support on agriculture*. Serta perbaikan pemberian *Special*

and Differential product yang diatur dalam mekanisme *domestic support* AoA (G-77/SS/2005/2, 2005).

C.4 Pembentukan Kelompok Negara G-33

Resmi dibukanya *Doha Round*, November 2001 menjadi awal yang baik bagi pemerintah India untuk menyampaikan aksi penentangannya dalam usulan draft proposal transformasi aturan *domestic support on agriculture*. Dari adanya hal tersebut, India membentuk sebuah aliansi negara yang memiliki kepentingan yang sama yaitu kelompok negara G-33.

Kelompok Negara G-33 aliansi negara berkembang dan negara kurang berkembang dengan populasi penduduk yang besar, dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pertanian diletakkan sebagai bagian penting dari perekonomian. Kelompok negara G-33 dibentuk pada 9 September 2003 di Indonesia. Pembentukan kelompok G-33 ini didasari atas tujuan yang sama karena menentang adanya skema AoA yang dinilai kurang menguntungkan bagi NSB. Kelompok G-33 ini diinisiasi oleh negara-negara berkembang yang berbasis agraria, India menjadi pemrakarsa munculnya kelompok negara G-33 ini bersama dengan Indonesia, China, dan Filipina yang dipercaya sebagai koordinator. Dengan beranggotakan 46 negara, kelompok G-33 sepakat untuk mengajukan penentanan terhadap WTO tentang skema AoA. Negara-negara yang tergabung dalam anggota G-33 ini meminta agar AoA harus diberlakukan secara khusus yang bersifat *special and different* (*Special and Differential Treatment/SDT*).

Hal yang kemudian menjadi pertimbangan dari tujuan tersebut adalah komoditas pertanian di NSB bukan hanya menjadi komoditas perdagangan, akan tetapi pertanian di NSB merupakan sebuah mata rantai yang berhubungan dengan berbagai macam mata pencaharian masyarakat mayoritas di NSB tersebut. Pertanian merupakan sebuah hal yang sangat kompleks apabila dihubungkan dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat, karena pertanian di NSB merupakan salah satu pemenuh kebutuhan sebagian besar masyarakat yang hidup di NSB. Dalam bentuk aliansi kelompok G-33 ini melibatkan tiga unsur yang semuanya berhubungan dengan pembayaran *domestic support on agriculture* yang dibatasi oleh WTO. Dua perubahan yang diusulkan adalah untuk meringankan persyaratan serta menaikkan batas maksimal *de minimis* yang disepakati sebelumnya (FAO, 2013).

Latar belakang dari dibentuknya proposal G-33 adalah melakukan perombakan aturan dalam skema AoA yang mendapatkan penentangan dari sejumlah negara termasuk India. Berdasarkan pada pertemuan Doha tahun 2001 yang membicarakan tentang pengurangan substansial dalam *domestic support on agriculture* serta tiga tahun kemudian membahas tentang review kriteria *green box* yang dalam hal ini dinilai masih kurang untuk menyeimbangkan perekonomian di NSB. Bahasan yang diusulkan oleh G-33 ini *Special Product (SP)*, *Special Safeguard Mechanism (SSM)*, dan *Public stockholding*. Proposal yang dibawa oleh G-33 ingin memodifikasi kriteria *green box*. Kelompok G-33 sangat kuat menuntut adanya perubahan aturan oleh WTO dan sangat defensive dalam hal perlindungan petani kecil. India menjadi negara yang sangat berpengaruh terhadap jalannya

penentangan dalam proposal yang diajukan oleh G-33, bersama dengan China dan India menjadi ‘raksasa’ negara berkembang. G-33 menginginkan adanya SDT terhadap negara berkembang sesuai dengan mandat Doha, yaitu alinea 13 Deklarasi KTM Doha menekankan mengenai kesepakatan agar SDT untuk negara berkembang akan menjadi bagian integral dari perundingan bidang pertanian yang memperhatikan pentingnya ketahanan pangan (*food security*), pembangunan pedesaan (*rural development*) dan jaminan penghidupan (*livelihood security*) (Utama, 2010).

Draft Doha *Development Agenda* pada perubahan *green box support* dalam *domestic support* menjalani proses negosiasi yang sangat panjang antara beberapa negara dan koalisi negara. Dalam perundingan tersebut, kelompok negara G-20 ingin adanya aturan yang diperketat untuk *green box*, akan tetapi negara-negara Afrika dan NSB yang tergabung dalam G-20 menginginkan adanya kriteria yang lebih luas untuk *domestic support* yang meringankan. Tanpa adanya perkembangan respon dari WTO dan negara maju, maka dari penuntutan ini hanya menghasilkan ulasan penggabungan fleksibilitas elemen tambahan untuk NSB yang akan dibahas lebih lanjut pada proposal G-33 selanjutnya (FAO, 2013).

Amandement proposal G-33 yang pertama adalah untuk menyertakan sub kategori tambahan program NSB serta daftar katagori umum pada *green box*. Berdasarkan laporan FAO, dalam amandemen pertama, G-33 mengusulkan menciptakan sub kategori yang meliputi:

"Kebijakan dan layanan yang terkait dengan petani pemukiman, program reformasi tanah, pedesaan pembangunan dan keamanan

mata pencaharian pedesaan di Anggota negara berkembang, seperti penyediaan layanan infrastruktur, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan pengelolaan sumber daya, manajemen kekeringan dan pengendalian banjir, program kerja pedesaan, gizi ketahanan pangan, penerbitan judul properti dan program pemukiman, untuk mempromosikan pedesaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan."

Amandemen yang kedua adalah public *Stockholding* pada NSB yang bertujuan untuk ketahanan pangan. Pada *Annex 3* lampiran proposal di jelaskan bahwa program *Stockholding* pemerintah NSB harus dilakukan secara transparan dan objektif sesuai ketentuan pada ayat ini, termasuk program saham dari bahan makanan yang bertujuan untuk ketahanan pangan. Namun akuisisi saham sektor pangan oleh NSB dengan tujuan untuk mendukung petani yang berpenghasilan rendah dan produsen miskin sumber daya tidak diperlukan untuk diperhitungkan dalam AMS. Sehingga, *de minimis* tidak akan mencapai batas maksimalnya.

Amandemen yang ketiga yang dituntut berhubungan dengan catatan kaki persyaratan pada *stockholding*. Untuk *annex 3* dan *4* dari lampiran ini berisikan tentang akuisisi bahan makanan bersubsidi pada produsen miskin dan berpenghasilan rendah untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan serta ketahanan pangan di NSB.

Proposal usulan G-33 menekankan bahwa WTO harus mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi NSB untuk menyesuaikan diri dengan aturan pembatasan *domestic support on agriculture*, serta untuk mencapai kemajuan sistem

perdagangan multilateral sejak akhir *Uruguay Round* sampai hampir dua dekade yang lalu. Pengalaman dari negara-negara di dunia terutama negara miskin dan NSB menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan (WTO) dan negosiator untuk memperhatikan secara seksama implikasi spesifik dari aturan dan mekanisme baru yang di jalankan.

C.5 Pembentukan Kelompok G-20

Kelompok G-20 merupakan kelompok negara yang tidak hanya menjadi aliansi NSB akan tetapi juga terdapat beberapa negara maju yang menjadi anggota. G-20 merupakan gabungan dari dua puluh menteri keuangan dan gubernur bank dengan 19 anggota ditambah dengan satu organisasi regional. Posisi India dalam kelompok ini merupakan motor bagi negara berkembang disamping negara Brazil. G-20 dipandang sebagai kompromi baru yang lebih baik antara kerjasama multilateral yang ada. G-20 merupakan kelompok negara yang memperjuangkan kepentingan NSB dan membunyai *think tank* yang kuat. Pada awal dibentuknya, kelompok G-20 ini merupakan forum yang menangani masalah keprihatinan kondisi sistem moneter dunia, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu kelompok G-20 tidak hanya membahas permasalahan moneter dunia.

Masalah pembatasan *domestic support on agriculture* saat ini juga menjadi masalah yang diperhatikan G-20, khususnya adalah NSB yang tergabung didalamnya. Posisi tawar India dalam kelompok ini sangat diperhitungkan karena di dalam aliansi kelompok terdapat negara *superpower* AS dan organisasi regional yang beranggotakan negara maju. Sehingga, India dalam hal ini menekankan kepentingan NSB dengan kekuatan diplomasi agar negara maju setuju untuk

melakukan transformasi kebijakan pembatasan *domestic support on agriculture*. Maka dari itu, isu pertanian yang berhasil ditekankan oleh NSB kelompok G-20 ini adalah menentang pembatasan subsidi domestik dan subsidi ekspor pertanian di negara industri maju, menentang liberalisasi, menghendaki *Special and Differential Treatment* (SDT) bagi NSB (Utama, 2010).

C.6 Penentangan India dalam Bali Package Agenda 2013

Proses penentangan India terhadap pembatasan *aturan domestic support on agriculture* mendapatkan jalan panjang, sejak awal KTM keempat WTO yang menghasilkan Doha Development Agenda (DDA), India belum mendapatkan respon positif dari draft negosiasi adanya transformasi aturan dalam perjanjian AoA. Kebuntuan DDA terjadi selama kurang lebih 12 tahun, yang akhirnya mendapatkan keputusan dari WTO pada tahun 2013 yang dikenal dengan Bali Package. Adapun perjalanan India menentang pembatasan *domestic support on agriculture* di NSB dapat diringkas dalam rangkaian sebagai berikut (Reni Kustiari, 2014):

- November 2001: Para Menteri Perdagangan menyepakati adanya “*Doha Round*” pada pertemuan di Doha, Qatar.
- September 2003: Para Menteri bertemu di Cancun. Pertemuan ini tidak berhasil menyepakati apapun dan negara-negara anggota terpecah menjadi beberapa kubu atas pembahasan Singapore Issues tersebut. India menginsiasi dibentuknya kelompok negara G-33 yang diketuai oleh Indonesia.

- Juli 2004: Negara-negara anggota menyepakati dan menandatangani beberapa hal pokok yang disebut sebagai “*framework package*” yang akan dilanjutkan ke perundingan Doha. Proposal G-33 tidak mendapatkan hasil.
- Tahun 2004-2007: Tidak terjadi kesepakatan apapun. Namun demikian negara-negara anggota menyusun dan menyempurnakan bahan-bahan negosiasi untuk isu *trade facilitation* termasuk didalamnya adalah perdagangan komoditas pertanian. Masing-masing kubu atau pihak menyiapkan bahan negosiasi untuk mencapai kesepakatan berikutnya. Dilakukan adanya peninjauan ulang sehingga membutuhkan amandemen ulang proposal yang telah diajukan masing-masing kelompok negara.
- Tahun 2008: Geneva “*mini-ministerials*” berusaha untuk menyepakati *draft text* untuk *trade facilitation*, akan tetapi dalam tahap ini belum mendapatkan kesepakatan yang dikehendaki. Pada tahap ini, pertentangan antara kubu negara maju dan negara berkembang saling melunak sehingga diajukannya *peace clause* atau klausul perdamaian.
- Desember 2009: Konsolidasi *draft text* yang berhasil disepakati dan diluncurkan.
- April 2011: Ketua dari working group “*trade facilitation*” menyepakati dan menyempurnakan *draft text*; kemudian dibahas di tingkat group negosiasi.
- Desember 2011: Pertemuan tingkat Menteri di Jenewa menyadari bahwa terjadi kebuntuan dalam negosiasi. Oleh karena itu, perundingan “*Doha*”

Round’ di deklarasi berstatus sebagai terhenti sementara (“*impasse*”). Akan tetapi tetap disepakati bahwa para negara anggota mencari peluang-peluang baru agar dapat terjadi perundingan lanjutan dengan pendekatan yang berbeda.

- Tahun 2012-2013: Konvergensi pandangan dari pihak-pihak yang berbeda akhirnya terjadi, perbedaan berhasil mengerucut menjadi apa yang disebut sebagai kemungkinan adanya “*early harvest*” dalam perundingan trade facilitation. Beberapa isu dari *Doha round* kembali mengemuka. Yang salah satunya adalah penentangan India terhadap pembatasan *domestic support on agriculture*. Perundingan-perundingan pada tahap selanjutnya diupayakan agar dapat menjadi potensi kesepakatan yang disebut sebagai “*Bali outcome*”.
- November 2013: Setelah dilakukan negosiasi-negosiasi yang sangat intensif di Jenewa untuk mencapai *Bali Ministerial Declaration*, namun tidak tercapai suatu kesepakatan yang konkrit. Oleh karena itu, *Director General of WTO* menyatakan keadaan “*impasse*”.

Perjalanan panjang negosiasi India terhadap WTO menemui beberapa kebuntuan ketika *draft text* yang diajukan oleh India kemudian baru mendapatkan respon positif pada tahun 2008. India dengan kelompok G-33 serta aliansi NSB yang tergabung dalam G-20 menentang adanya proposal dari negara maju untuk mendisiplinkan kebijakan *domestic support on agriculture* yang terfokus pada *green box*. Pengajuan klausul perdamaian oleh kelompok negara G-20 kemudian

menjadikan isu masuk kedalam *draft text Trade Facilities* (TF). Pada bagian II dalam paket “*Early Harvest*” dari perjanjian WTO yang komprehensif tahun 2012-2013, negara anggota menyetujui tentang *Special and Differential Treatment* (SDT) untuk NSB dan negara kurang berkembang (Reni Kustiari, 2014). India memandang bahwa kebijakan pada *Bali Package Agenda* dalam “*Early Harvest*” ini kurang tegas, sehingga India menginginkan adanya keputusan yang tegas terhadap adanya pembatasan *domestic support* yang dalam hal ini tidak menguntungkan NSB. NSB dengan kemampuan ekspor lemah khawatir bahwa apabila tidak mempunyai keunggulan komparatif maka pasar domestiknya akan dibanjiri dengan produk impor. Dengan tingginya nilai impor akan mengganggu neraca pedagangannya. Oleh karena itu, perlu adanya keputusan lain di luar TF sebagai kesempatan NSB untuk menyeimbangkan efek negative dari adanya pembatasan *domestic support* tersebut.

Sehingga, pada November 2013 diadakan proses negosiasi yang cukup intensif, kelompok negara G-33 yang dipimpin India dan Indonesia menyatakan sikap tegasnya untuk tetap menuntut adanya perubahan aturan pembatasan *domestic support on agriculture*. Namun, negosiasi tersebut tidak mendapatkan sebuah keputusan yang kongkrit, dimana Amerika Serikat tetap pada pendapatnya untuk menolak adanya keputusan tersebut. Tidak tercapainya kesepakatan *Bali Ministerial Declaration* ini diikuti dengan WTO menyatakan keadaan “*impasse*”. Tidak selang beberapa lama, pada tanggal 3-6 Desember 2013, diadakan KTM ke-9 WTO. Sebanyak 159 Menteri dari perwakilan negara anggota berkumpul untuk menghasilkan terobosan dari negosiasi panjang selama 12 tahun. Terobosan ini

diperlukan untuk mencapai kesepakatan antara setiap negara yang mempunyai kepentingan masing-masing. Sehingga, hasil dari terobosan ini dikenal dengan “*Bali Package*”.

Keputusan *Bali package*, WTO mengakomodasi penentangan India terhadap pembatasan *domestic support on agriculture* dalam draft proposal negosiasi proposal G/AG/NG/W/102 (WTO, 2016). India dalam posisi ini adalah menentang WTO atas dasar kepentingan masyarakat India yang sangat besar. Dengan sumber daya manusia yang tinggi, dan sumber daya alam yang sangat besar India mempunyai posisi tawar yang diperhitungkan dalam dunia internasional. Sebagai NSB, India memiliki peranan yang besar dalam aliansi negara yang dibentuknya. Peran India sangat signifikan dalam mengarahkan tujuan kelompok G-33. NSB yang tergabung dalam kelompok negara G-33 memandang India menjadi salah satu negara yang berpengaruh dan raksasa negara berkembang saat ini (Bary, 2013). Dengan adanya pandangan inilah India mampu bersikap keras terhadap WTO untuk memperjuangkan kepentingannya. Meningkatnya posisi tawar India terhadap dunia internasional berdampak pada kekuatan diplomasi yang dimiliki India sebagai NSB yang diperhitungkan. Diplomasi India merupakan strategi politik luar negeri yang utama dimiliki India sebagai NSB karena terbatasnya militer dan ekonomi.

Bergabungnya India dalam kelompok negara G-20 yang didalamnya merupakan gabungan dari beberapa NSB dan negara maju, menambah kekuatan diplomasi India. India masuk dalam kelompok G-20 sebagai NSB yang mampu menggunakan kekuatannya yang kemudian digunakan untuk

mempengaruhi kepentingan negara maju dalam kelompok tersebut. Terbukti dengan bergabungnya India di kelompok G-20, kemudian India sebagai penentang kepentingan negara maju dalam kelompok G-20 tersebut dalam negosiasi AoA. Berdasarkan hal tersebut, dilihat bahwa India bukan lagi sebagai negara peripheral akan tetapi negara yang mempunyai *Middle power* dengan kekuatan diplomasi yang tinggi dan mempunyai posisi tawar yang diperhitungkan dalam dunia internasional. Cooper menerangkan bahwa:

“Proposed that pursuing multilateral solutions to international problems, preferring compromise positions in international disputes and embracing notions of good international citizenship constitute the typical behavior of a middle power” (Cooper, 1993).

Penyelesaian negosiasi masalah pembatasan *domestic support on agriculture*, India melakukan perannya sebagai NSB dengan mengakomodasi kepentingan NSB yang diupayakan dalam negosiasi KTM WTO dengan menekan negara maju untuk setuju terhadap proposal negosiasi yang diajukan oleh India tersebut.

Shin, Dong-Min dalam bukunya, *Concept of Middle Power and the Case of the ROK* menerangkan bahwa (Shin, 2012):

“A middle power is a state actor which has limited influence on deciding the distribution of power in a given regional system, but is capable of deploying a variety of sources of power to change the position of great powers and defend its own position on matters related to national or regional security that directly affect it”

India dengan sikap tegasnya menyatakan penentangannya terhadap WTO sebagai rezim perdagangan internasional, India mampu untuk mempertahankan

sikapnya sampai dengan WTO memberikan respon positif terhadap penentangan tersebut. Dengan sumber daya yang tinggi India berani untuk menjelaskan posisinya di dunia internasional.